

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial adalah tujuan pembangunan suatu wilayah atau negara. Beberapa ukuran kemajuan ekonomi sering dihadapkan selama proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Seperti yang disampaikan Todaro (2011) menggambarkan pembangunan ekonomi sebagai suatu tahap yang kompleks yang mencakup akumulasi berbagai perkembangan penting pada organisasi sosial, persepsi masyarakat, serta institusi nasional, termasuk mendorong kemajuan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menangkalkan kemiskinan. Dalam hal ini, menjadi tenaga kerja, elemen pembangunan, dan penerima hasil pembangunan, manusia berperan yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Tahap ini memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan dan tumbuh dengan baik.

Subandi (2014) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah kumpulan tindakan diambil suatu pemerintah untuk memajukan ekonomi dengan tujuan menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau negara dalam waktu yang lama. Peningkatan taraf hidup ini dapat dilihat dengan naiknya penghasilan perkapita masyarakat. Kenaikan pendapatan perkapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur yang memadai harus diberikan kepada kegiatan ekonomi untuk mendukung peningkatan potensi daerah secara berkesinambungan sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan utama mereka. Karena infrastruktur merupakan kepentingan umum, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah. Namun, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 mengenai Kerjasama Pemerintah bersama Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur, pemerintah mampu berkoordinasi dengan badan usaha pada penyediaannya. Di Indonesia Infrastruktur telah dibangun dalam waktu yang lama dan investasi yang signifikan telah dilakukan. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah, terutama terkait dengan rancangan yang buruk, jumlah yang tidak mencukupi, dan kualitas yang buruk. (*World Economic Forum, 2013*).

Menurut Ja'far (2007), infrastruktur berperan baik kepada pertumbuhan ekonomi dengan sesaat dapat membuat tempat kerja sektor konstruksi dan jangka menengah serta panjang dapat mendorong efisiensi dan produktivitas sektor tersebut. Sedangkan menurut Ernawi (2007), jika tidak adanya fasilitas umum yang memadai, kegiatan ekonomi masyarakat sebuah negara tidak bisa berproses dengan baik. Walaupun kerja sama yang dilakukan dengan badan usaha yang dipilih dapat membuat suatu pengadaan infrastruktur, pemerintah memiliki andil yang penting dalam hal ini. Namun, tidak keseluruhan fasilitas infrastruktur dapat dilakukan oleh pihak luar karena memerlukan dana yang besar, dan waktu pengerjaan yang lama, serta memiliki tantangan investasi yang tinggi. Penambahan fasilitas umum diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan mempercepat kemajuan ekonomi karena perekonomian akan berjalan lebih baik jika layanan terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas umum yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kegiatan produksi, perdagangan, pengurangan kemiskinan, peningkatan populasi, menarik investasi, dan memperbaiki lingkungan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur suatu daerah. Menurut Arsyad (1997), fakta bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah terkait erat dengan ketersediaan infrastruktur yang ada menunjukkan bahwa infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran wilayah tersebut. Pendapat ini didukung oleh Domar (1946), jika setiap perekonomian dapat menabung sebagian dari penghasilannya maka bisa memperbaiki barang modal rusak. Oleh sebab itu, untuk memperkuat perekonomian, memerlukan dana baru sebagai tambahan cadangan dana. Keterkaitan ini dikenal dengan *Capital Output Ratio* (COR). Teori ini memberikan penjelasan, ketika ingin maju perekonomiannya, maka suatu bagian dari output harus disimpan dan diinvestasikan. Lebih banyak uang yang diinvestasikan, maka pertumbuhan ekonomi menjadi cepat di suatu daerah maupun negara (Lincoln, 2004).

Pembangunan infrastruktur itu sendiri merupakan indikator terpenting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di suatu daerah maupun negara, infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan oleh para ekonom. Hingga sekarang, pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua pendapat. Pertama berpendapat bahwa infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi secara positif, sedangkan yang kedua melihat bahwa infrastruktur tidak memiliki pengaruh terlalu banyak, bahkan berdampak negatif. (Tandung, 2015).

Dilihat dari penelitian Calderon dan Serven (2004) melihat pengembangan infrastruktur berdampak pada distribusi pendapatan dan peningkatan ekonomi. Kajian ini memakai sampel 121 negara dimulai dari tahun 1960 sampai 2000. Dimana penelitian tersebut menunjukkan pembangunan yang cocok serta pengaruh baik pada peningkatan ekonomi dalam jangka panjang, sementara pemerataan pendapatan dapat terganggu oleh infrastruktur yang buruk.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya akan bisa lebih tinggi jika daerah tersebut mau mengalokasikan porsi PDB yang lebih tinggi untuk infrastruktur. Infrastruktur dapat dikatakan sebagai penggerak pembangunan nasional. Perbaikan pada sektor infrastruktur tentunya dapat mendorong minat investasi asing dan domestik. Keberadaan infrastruktur yang memadai seharusnya akan berkontribusi kepada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa antarwilayah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini terdapat berbagai infrastruktur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya Infrastruktur Ekonomi (Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Distribusi Air, Infrastruktur Listrik) dan Infrastruktur Sosial (Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan).

Tabel 1. 1 Dinamika Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Distribusi Air, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telpon Seluler, Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan Sumatera Barat Periode 2018-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Panjang Jalan (Km)	Distribusi Air (M³)	Listrik (MWh)	Telpon Seluler (%)	Pendidikan (Unit)	Kesehatan (Unit)
2018	5.14	230.98	91364794	3.496,18	77.89	4.873	2.563
2019	5.01	234.3	101035798	3.445,08	79.47	4.905	2.562
2020	-1.61	891.43	109266292	3.429,29	83.03	4.891	7.814
2021	3.29	888.03	105405147	3.646,20	86.7	4.890	8.264
2022	4.36	872.48	107687490	3.630,43	85.65	4.871	8.414

Sumber: BPS Sumatera Barat

Dari tahun 2018 hingga 2022, analisis data menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pertumbuhan ekonomi dan layanan publik, yang mencerminkan interaksi antara faktor-faktor eksternal dan kebijakan pemerintah. Pada saat tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 5,14%, menandakan kondisi makroekonomi yang stabil. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini sedikit menurun menjadi 5,01%, meskipun tetap berada dalam kisaran yang sehat. Penurunan ini dapat dianggap sebagai sinyal awal ketidakpastian yang lebih besar di pasar global dan domestik.

Tahun 2020 menjadi titik kritis ketika ekonomi mengalami kontraksi yang signifikan, dengan pertumbuhan mencapai -1,61%. Dampak dari COVID-19 mengakibatkan tekanan yang cukup besar terhadap sektor ekonomi, yang memperlihatkan ketergantungan pada aktivitas sosial dan ekonomi sebelumnya berjalan lancar. Namun, meskipun menghadapi tantangan yang berat, pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021, ketika pertumbuhan meningkat menjadi 3,29%. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan angka pertumbuhan mencapai

4,36%, menandakan adanya pemulihan yang berkelanjutan dan optimisme untuk masa depan ekonomi.

Selama lima tahun terakhir, jalan-jalan di Sumatera Barat yang berkualitas baik menunjukkan kemajuan yang tidak konsisten. Panjang jalan pertama kali dicatat sebesar 230,98 km pada 2018 dan sedikit meningkat menjadi 234,3 km pada 2019. Namun, pada 2020, panjang jalan menurun drastis menjadi hanya 891,43 km, yang mungkin disebabkan oleh revisi data atau perubahan metode pengukuran. Dengan total 872,48 km, tren penurunan ini akan berlanjut hingga 2022. Penurunan ini sangat penting karena infrastruktur jalan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kondisi ini dapat berdampak pada distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan akses ke berbagai layanan publik. Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan jalan yang berkelanjutan di masa mendatang, kebijakan diperlukan. Meskipun panjang jalan tetap sama, aksesibilitas mungkin meningkat karena populasi dan aktivitas ekonomi, yang membutuhkan distribusi logistik yang baik. Ketika ekonomi pulih pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi ekonomi yang tajam pada 2020, stabilitas infrastruktur jalan yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas atau jangkauan dapat menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang meningkat, terutama untuk industri yang terkena dampak seperti pariwisata dan perdagangan. Jika tidak ada peningkatan panjang atau kapasitas jalan, beban pada infrastruktur jalan yang ada dapat meningkat. Dalam jangka panjang, stabilitas infrastruktur jalan tanpa pengembangan yang memadai dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas jalan atau upaya pengelolaan lalu lintas yang lebih baik.

Selaras dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi, sektor distribusi air mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Di Sumatera Barat, distribusi air mencapai 91.364.794 m³ pada 2018 dan terus meningkat menjadi 101.035.798 m³ pada 2019. Ada sedikit penurunan pada 2021 menjadi 105.405.147 m³ dan 2022 menjadi 107.687.490 m³. Namun, secara keseluruhan, distribusi air menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yang mungkin merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperluas sistem distribusi air. Sementara itu, angka distribusi listrik di Sumatera Barat relatif stabil dan sedikit berubah. Distribusi listrik di provinsi ini tercatat 3.496,18 MWh pada 2018 dan

sedikit menurun menjadi 3.445,08 MWh pada 2019. Kemudian, distribusi kembali meningkat menjadi 3.646,20 MWh pada 2021 dan sedikit menurun lagi menjadi 3.630,43 MWh pada 2022, tetapi tetap berada di kisaran yang sama. Ini menunjukkan bahwa pasokan listrik di provinsi ini relatif stabil meskipun ada sedikit perubahan. Sementara itu selama lima tahun terakhir, tren penggunaan telepon seluler telah meningkat secara signifikan. Persentase pengguna telepon seluler pada 2018 tercatat sebesar 77,89%, menunjukkan adopsi teknologi yang cukup tinggi. Angka ini terus meningkat menjadi 79,47% pada 2019 dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 86,7%, menunjukkan peningkatan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan teknologi komunikasi yang lebih terjangkau. Namun, pada 2022 terjadi penurunan sedikit ke 85,65%, mungkin karena faktor ekonomi atau perubahan pola pengguna. Secara keseluruhan, kecenderungan ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi komunikasi bagi masyarakat. Meningkatnya penggunaan telepon seluler mendorong digitalisasi, inklusi sosial, dan akses informasi yang lebih luas. Perbaikan layanan dan perluasan jaringan ke daerah terpencil adalah masalah yang perlu diatasi ke depan.

Di bidang pendidikan menunjukkan tren yang lebih stabil, namun tetap menghadapi berbagai tantangan. Jumlah unit prasarana pendidikan meningkat dari 4.873 unit di tahun 2018 menjadi 4.905 unit pada tahun 2019. Namun, di tahun 2020, angka ini sedikit menurun menjadi 4.891 unit, yang mungkin disebabkan oleh penutupan sekolah akibat pandemi. Setelah itu, pendidikan stagnan di kisaran 4.890 unit hingga 4.871 unit pada tahun 2022, mencerminkan tantangan dalam investasi pendidikan yang berkelanjutan, serta perlunya perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur pendidikan untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Sebaliknya, infrastruktur kesehatan mengalami peningkatan yang dramatis. Dari 2.563 unit pada tahun 2018, jumlah kesehatan meningkat tajam menjadi 7.814 unit pada tahun 2020, sebagai respons terhadap krisis kesehatan akibat pandemi. Investasi besar dalam sektor kesehatan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk memastikan akses fasilitas kesehatan yang lebih bagus bagi masyarakat. Kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai 8.414 unit pada tahun 2022, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan layanan kesehatan masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan interkoneksi yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. Meskipun COVID-19 menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pendidikan, respons cepat dalam investasi infrastruktur kesehatan dan keberlanjutan dalam distribusi air dan listrik menunjukkan kemampuan negara untuk beradaptasi dan bertahan dalam kondisi yang sulit. Namun, tantangan dalam pengembangan pendidikan tetap harus dihadapi untuk memastikan pertumbuhan di masa akan datang yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan ekonomi dan penguatan layanan publik akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Peneliti memilih variabel pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, distribusi air, listrik, prasarana pendidikan, dan prasarana kesehatan karena keenam variabel ini berperan penting sebagai indikator utama dalam menilai perkembangan ekonomi dan kualitas hidup di Sumatera Barat. Infrastruktur jalan memfasilitasi mobilitas dan distribusi barang dan jasa, yang berdampak langsung pada kegiatan ekonomi. Distribusi air dan listrik mencerminkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar untuk produktivitas dan kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen penting dari indeks pembangunan manusia, menunjukkan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti dapat menentukan hubungan dan kontribusi masing-masing infrastruktur terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan mengukur variabel ini secara menyeluruh selama periode 2018–2022.

Prasetyo dan Firdaus (2009) menunjukkan bahwa fenomena pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Sumatera Barat mencerminkan tantangan signifikan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa sektor infrastruktur, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap sangat mencolok. Daerah-daerah terpencil seringkali menghadapi kendala dalam hal infrastruktur, yang mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2021, tercatat bahwa 41,85% rumah tangga di provinsi ini mengandalkan air kemasan sebagai sumber air minum. Sementara itu, di Kabupaten Dharmasraya, sekitar 16 dari setiap 100 rumah tangga masih menggunakan sumur tak terlindungi untuk mendapatkan air minum. Hal serupa juga terlihat pada infrastruktur penerangan; meskipun 97,55% rumah tangga di Sumatera Barat menggunakan listrik dari PLN, masih ada 11 dari 100 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bergantung pada sumber penerangan non-listrik.

Dari segi fasilitas pendidikan, pada tahun 2021 terdapat 4.871 unit sekolah yang mencakup tingkat SD hingga SMA. Namun, distribusi fasilitas ini menunjukkan ketidakmerataan yang mencolok: hanya sekitar 785 unit yang berada di daerah perkotaan, sedangkan mayoritas sisanya terletak di wilayah kabupaten. Ketimpangan ini juga tercermin dalam sektor kesehatan, dimana dari total 8.414 unit fasilitas kesehatan, hanya 1.865 unit yang tersedia di daerah perkotaan, sedangkan sebagian besar berada di kabupaten.

Ketidakmerataan dalam penyediaan infrastruktur dasar ini menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam akses terhadap layanan penting antara daerah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Barat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai dampak dari ketidakmerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah. Karena itu, penelitian ini berguna untuk menyelidiki bagaimana disparitas dalam ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di setiap daerah, baik kota maupun kabupaten, di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan, perlu adanya kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada investasi infrastruktur di daerah yang kurang berkembang di Sumatera Barat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai bukan hanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan infrastruktur harus dijadikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, mengingat dampaknya yang luas terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Infrastruktur yang efisien dan terjangkau merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas regional. Pembangunan nasional harus dirancang sebaik mungkin untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, namun juga inklusif, dengan memastikan distribusi manfaat yang merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan harus mencukupi kebutuhan saat ini tanpa menggadaikan kemampuan mendatang, sekaligus mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di antara kelompok penduduk. Oleh sebab itu, pembangunan yang inklusif dapat disertai dengan penciptaan peluang ekonomi baru, serta menjamin akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat, utama sekali bagi kelas yang paling bawah dan terkategori miskin (Prasetyo dan Firdaus, 2009).

Secara keseluruhan, infrastruktur adalah pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketersediaan yang memadai dari sektor jalan, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jika salah satu elemen infrastruktur ini lemah, akan terjadi dampak negatif yang dapat memperlambat pembangunan di sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, kajian menyeluruh tentang bagaimana infrastruktur-infrastruktur tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan. Memahami sinergi antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi akan membantu dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, memastikan setiap sektor saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan yang optimal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berguna untuk menyelidiki bagaimana disparitas dalam ketersediaan infrastruktur mempengaruhi perkembangan ekonomi di setiap daerah, baik kota maupun kabupaten, di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam hubungan dan pengaruh berbagai faktor infrastruktur, Infrastruktur Ekonomi (Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Distribusi Air, Infrastruktur Listrik, dan Infrastruktur Telpon Seluler) dan Infrastruktur Sosial (Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan), terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan mengidentifikasi kontribusi masing-masing faktor infrastruktur, diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas terhadap rancangan pembangunan yang efektif dapat menaikkan kemajuan ekonomi inklusif serta berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah dasar dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur sosial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan masalah sebelumnya, penulis mengidentifikasi tujuan penelitian yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis peran infrastruktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis peran infrastruktur sosial dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis mengidentifikasi manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis: Kajian tersebut akan memperkaya literatur bidang ekonomi, sosiologi, dan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Praktis: Hasil kajian ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
3. Sosial: Studi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya infrastruktur sebagai indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.